



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4843-4864

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pemilu 2024 dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, dan Kekuasaan Oligarki

Lilik Sumarni

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: [liliksumarni1@gmail.com](mailto:liliksumarni1@gmail.com)

### Abstrak

Tinjauan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis hubungan kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik yang memengaruhi dinamika politik dalam konteks pemilihan umum, serta bagaimana media massa mampu menciptakan "simulakra," yang saat ini telah mendominasi realitas politik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *literature review*. Hasil penelitian tinjauan pustaka menunjukkan bahwa di Indonesia, media massa, yang seharusnya menjadi penyalur kepentingan publik, menghadapi tantangan serius. Potensi kekuasaannya terkooptasi oleh kepentingan bisnis dan politik, terutama melalui oligarki media, yang dapat mengancam demokrasi. Dinamika kompleks antara media massa, politik, dan ekonomi menciptakan risiko pembatasan pilihan, kehilangan karakter lembaga publik, dan polarisasi masyarakat. Proses pencalonan Presiden dipengaruhi secara signifikan oleh media, yang menjadi alat untuk menciptakan citra yang menguntungkan. Prediksi untuk Pemilu 2024 menyoroti peningkatan peran media digital, menekankan perlunya pengawasan ketat dan regulasi. Kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi media menjadi kunci untuk mengatasi potensi ancaman terhadap integritas demokrasi, memastikan respons yang bijak dan kritis menjelang pemilihan.

Kata Kunci: *Pemilu 2024, Agenda Media, Simulakra, Hiperealitas, Oligarki*

## Abstract

This review aims to identify and critically analyze the complex relationship between the 2024 General Election, mass media, and aspects of political economy that influence political dynamics in the context of general elections, as well as how mass media are able to create "simulacra," which currently dominate political reality. In this study, researchers used the literature review method. The results of the literature review research show that in the face of the 2024 General Election in Indonesia, the mass media, which is supposed to be a channel for public interests, faces serious challenges. Its potential power is co-opted by business and political interests, especially through the media oligarchy, which can threaten democracy. The complex dynamics between mass media, politics and economics create the risk of limiting choice, losing the character of a public institution and polarizing society. The Presidential nomination process is significantly influenced by the media, which becomes a tool to create a favorable image. Predictions for the 2024 elections highlight the increasing role of digital media, emphasizing the need for strict oversight and regulation. The public's critical awareness of media information is key to addressing potential threats to democratic integrity, ensuring a wise and critical response in the run-up to the election.

Keywords: *2024 Election, media agenda, simulacra, hyperreality, oligarchy*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2024 mendatang di Indonesia adalah peristiwa penting bagi demokrasi (Dwi, 2023), namun ada kekhawatiran tentang drama politik yang terjadi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya demokrasi politik yang efektif, mendorong masyarakat untuk fokus pada ide-ide besar dan masa depan bangsa. Beliau menekankan perlunya kerja sama, transparansi, dan keadilan dalam mengawasi pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Media memainkan peran penting dalam memberitakan isu-isu terkait Pemilu 2024, termasuk strategi politik, persiapan, sosialisasi, kontestasi antar elit politik, dan pengawasan. Pada tahun 2024, ada enam partai pendatang baru yang siap ikut serta dalam kontestasi pemilu berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 (Barokah & Hertanto, 2022). Artikel ini membahas peluang dan tantangan yang dihadapi oleh partai-partai baru ini di era disrupsi, di mana teknologi informasi dapat dimanfaatkan. Strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan memperkuat demokrasi internal partai guna menghindari konflik antar anggota. Partai politik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mobilisasi massa dan memperkuat citra partai. Namun, perlu diingat bahwa disrupsi juga dapat memberikan dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian antar partai politik di media sosial. Oleh

karena itu, partai politik perlu bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan dampak positif dari teknologi informasi lebih dominan daripada dampak negatifnya.

Simulakra dan hiperealitas media menurut Jean Baudrillard (Ane, 2023), dengan menyoroti masyarakat *postmodern*, dijelaskan bahwa *term simulakra* secara harfiah dalam *The Oxford English Dictionary* berarti "aksi menirukan dengan maksud menipu". Simulakra hadir dalam dunia yang penuh dengan model dan permainan sibernetik. Ini terjadi melalui proses peniruan, reproduksi citra, dan duplikasi dari sesuatu yang sudah ada. Proses ini terjadi dalam konteks sosial masyarakat, dan menyebabkan percampuran antara yang nyata dan yang palsu, antara yang benar dan yang salah, serta antara yang fakta dan yang bukan fakta. Manusia hidup dalam dua jenis realitas, yaitu realitas nyata dan realitas tiruan atau imitasi. Karena itu, mereka sering kesulitan membedakan mana yang benar-benar nyata dan mana yang tiruan. Adapun kata "oligarki," (Fachrudin.A. 2022: 3-4), berasal dari bahasa Yunani. Oligarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok elit yang dapat dibedakan berdasarkan kekayaan, keturunan, atau unsur militer.

Dinamika politik jelang Pemilu 2024 penuh kejutan dan terlihat begitu panas meskipun kampanye belum waktunya. Seperti dalam Retamara et al. (2023), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dinamika politik dalam proses pencalonan Presiden pada pemilu 2024 disebabkan oleh indikator tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan menjelang pemilu mendatang. Hal ini menjadi penting karena tindakan para aktor atau elit politik sangat memengaruhi opini publik dalam rangka meraih dukungan suara.

Fenomena buzzer telah menjadi bagian dari wacana politik dan pemasaran politik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2023), fenomena buzzer dan perang siber yang terjadi di media sosial dipengaruhi oleh gejolak reformasi dan perkembangan era media digital. Kebebasan berekspresi yang ada dalam negara demokrasi menjadi sangat ekstrem berkat teknologi media sosial. Hal ini menjadi efektif ketika pesan-pesan kebencian, dukungan politik, dan perang siber menyebar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). Perang siber yang dilakukan oleh para buzzer di media sosial juga dapat menyebabkan polarisasi di antara netizen. Polarisasi ini bisa terlihat dari perbedaan wacana, opini, isu, dan rumor yang berkembang di berbagai kelompok di media sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep opinion leader telah bergeser, dari teori komunikasi two step flow menjadi lebih fokus pada pembentukan opini secara anonim dalam konteks media baru.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *literature review* (tinjauan pustaka). *Literature review* atau *literature research* adalah suatu metode penelitian yang melibatkan kajian dan analisis kritis terhadap pengetahuan, ide, atau temuan yang ada dalam literatur akademik. Tujuannya adalah untuk merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis terhadap topik penelitian yang spesifik. Studi literatur melibatkan penggunaan berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumen, internet, dan referensi pustaka, sebagai basis penelitian. Metode studi literatur melibatkan aktivitas pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola informasi yang relevan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Suatu penelitian membahas tentang praktik oligopoli di sektor media massa Australia menunjukkan dominasi yang besar oleh sekelompok sedikit pengusaha kaya. Sistem kepemilikan media massa di Australia dapat diidentifikasi sebagai bentuk oligopoli yang signifikan, dan faktor ekonomi serta politik telah memperkuat posisi media tersebut. Keberadaan oligopoli ini sulit untuk diubah karena campur tangan kelompok kepentingan dan tekanan. Pertumbuhan oligopoli media ini dipengaruhi oleh faktor politik, termasuk pemberian izin stasiun televisi kepada perusahaan tertentu. Pemegang kekuasaan media di Australia, sebagai pemain jangka panjang, telah membangun dominasi yang sulit diganggu, baik dari segi ekonomi maupun politik. Meskipun demokrasi di Australia telah berkembang positif, pembatasan dalam variasi pilihan dapat mengancam esensi demokrasi sejati, di mana kekuasaan dan pengaruh cenderung dikendalikan oleh pemodal dan elit politik (Hartati & Wahyuni, 2021).

Disamping itu penelitian lainnya membahas tentang industri media massa dan politik kontemporer di Indonesia sangat terkait dan saling menguntungkan. Studi mengenai peran media massa dalam politik menjadi penting, tetapi memunculkan kesulitan dalam menilai netralitasnya. Penelitian ini bertujuan memahami netralitas media massa selama pemilu 2014 di tengah pengaruh politik dan ekonomi. Metode penelitian kualitatif dengan paradigma kritis digunakan, dengan fokus pada teori politik ekonomi media. Hasil awal menunjukkan media massa lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi.

Konten media lebih dipilih oleh kekuasaan politik, ekonomi, pemilik modal, dan orientasi pendapatan media daripada oleh publik, meskipun seharusnya publik memiliki hak untuk memilih kebenaran dan informasi yang benar.

Tabel 1. Literature Review

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
1	Hasan, K. (2017). Kajian Ekonomi Politik Media.	Teori politik ekonomi media	Metode kualitatif	Indonesia	Bentuk dan konten media massa kontemporer lebih banyak ditentukan oleh kekuatan politik dan ekonomi. Pengamatan dan realitas kehidupan media massa digunakan sebagai data primer, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa industri media massa menjadi alat yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan politik, citra, dan pandangan masyarakat. Namun, media massa mulai kehilangan karakternya sebagai lembaga publik dan telah terlalu terlibat

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
2	Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik.	Perspektif Empat Teori Pers dan Tiga Model Media dan Politik	Metode kualitatif	Indonesia	dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni. Media massa yang memainkan peran penting sebagai kekuasaan keempat. Proses komunikasi massa berlangsung dalam aliran sistem politik negara, dilihat dari perspektif Empat Teori Pers dan Tiga Model Media dan Politik, demokrasi dapat berkembang sesuai dengan teori libertarian dan tanggung jawab sosial dalam Empat Teori Pers, serta demokrasi liberal dan korporat dalam Tiga Model Media dan Politik. Peran penting media massa sebagai kekuasaan keempat dapat diwujudkan. Sementara di negara yang menganut sistem media dan politik sesuai dengan teori otoriter, teori komunis Soviet, dan model pluralis

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
					pluralis tidak mungkin. Meskipun proses komunikasi massa dapat memainkan perannya sebagai kekuasaan keempat dalam ranah demokrasi, tetapi ada tantangan serius yang harus dihadapi, yaitu konglomerasi media.
3	Hartati, A. Y., & Wahyuni, Y. (2021). Oligopoli di Negara Demokrasi: Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia.	Demokrasi i Ekonomi politik	Metode kualitatif	Australia	Media di Australia telah berkembang selain faktor ekonomi, juga faktor politik yang membuat sulit bagi kelompok kepentingan dan kelompok tekanan di Australia untuk melemahkan kekuatan mereka. Tembok oligopoli media massa di Australia. Oligopoli ini tumbuh karena faktor politik yang ada, seperti pemberian izin membuat stasiun televisi kepada perusahaan tertentu. Selain itu, sebagai pemain jangka panjang, raja-raja media di Australia telah mendirikan sebuah ketatanegaraan yang

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
					sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Monopoli adalah musuh utama demokrasi. Meskipun kehidupan demokratis masyarakat Australia telah terbudaya, jika pilihan bebas dibatasi, maka demokrasi bukan bentuk demokrasi yang sejati. Demokrasi yang kelangsungannya dan produknya diarahkan oleh pemegang modal dan kekuasaan.
4	Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demokrsari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan.	Demokras i, Media dan oligarki	Metode kualitatif	Indonesia	Oligarki akan menyebabkan nilai-nilai seperti persamaan, parsitipasi politik, keterbukaan, kebebasan, dll. Demokrasi yang terbajak oleh oligarki akan menyebabkan segenap kebijakan semata diserahkan pada pemenuhan kepentingan eksklusif para elit, pengusaha. Hal ini menyebabkan demokrasi kesejahteraan rakyat menjadi

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
					tersendat. Sementara itu dalam kehidupan bermasyarakat hampir dimana ada mayoritas baik dalam agama, ekonomi, moral, politik, dll. Yang mayoritas sering mengalami penderitaan karena tertekan oleh pihak mayoritas. Dan hubungan antara kaum mayoritas-minoritas sering menimbulkan konflik sosial yang tidak bersahabat. Hal ini disebabkan adanya perilaku diskriminatif yang muncul karena menganggap kelompok lain sebagai out-group yang merupakan lawan bagi mereka terutama bagi kaum minoritas yang dianggap asing oleh kaum mayoritas.
5	Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia	demokrasi dan kebebasan pers di keenam negara	Metode kualitatif	Asia Tenggara	Aspek-aspek yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran oleh pemerintah, gangguan terhadap jurnalis, bias media, korupsi di media,

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
	Tenggara: Refleksi dari Enam Negara..				<p>dan pengawasan internal di media. Melalui perbandingan keenam negara tersebut, secara umum terlihat bahwa kondisi kebebasan pers dan media berkorelasi dengan tren penurunan demokrasi. Di negara-negara yang mengalami penurunan skor demokrasi, skor kebebasan pers dan media juga cenderung menurun. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers seringkali terganggu oleh undang-undang dan regulasi yang memberlakukan pembatasan, pengawasan ketat, dan intimidasi terhadap organisasi media dan jurnalis. Praktik ini mencerminkan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara.</p>

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
6	Retamara, R., Budianto, K., & Apriani, R. (2023). Analisis Tindakan Aktor-Aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial.	Teori Aksi Aktor Politik	Metode kualitatif	Indonesia	Dinamika politik dalam proses pencalonan Presiden pada pemilu 2024 disebabkan oleh indikator tindakan dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan menjelang pemilu mendatang. Pertama, dinamika politik dalam konteks partai politik dan kedua, dinamika politik dalam konteks figur aktor politik. Hal ini menjadi penting karena tindakan para aktor atau elit politik sangat memengaruhi opini publik dalam rangka meraih dukungan suara.
7	Triputranti, C. S. (2023). Oligarki Dan Konvergensi Media Dalam Pemberitaan "Jokowi 3 Periode".	Teori Media Baru Dan Konvergensi	Metode kualitatif	Indonesia	Kepemilikan media menjadi faktor penentu dalam menentukan arah pemberitaan media, yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi para pemilik media, dan hal ini semakin diperkuat dan meluas oleh konvergensi media.

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
8	Intani, A. (2023). <i>Analysis of the Closed Proportional Implementation Plan in the 2024 Election.</i>	Demokrasi menganalisis rencana pelaksanaan proporsional tertutup pada pemilu 2024	Metode kualitatif	Indonesia	Sistem yang digunakan Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional. Sistem pemilu proporsional telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1955. Ada dua bentuk sistem proporsional yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka. Sistem yang digunakan saat ini adalah sistem proporsional terbuka. Namun pada tahun 2019 sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menganalisis rencana pelaksanaan proporsional tertutup pada pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
					literatur. Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemilu di Indonesia pada tahun 2024 harus didasarkan pada hasil evaluasi beberapa pemilu yang lalu. Mulai dari tatanan konstitusi, demokrasi, anggaran pemilu, kecurangan, biaya politik, dan hak asasi manusia. Ada kekhawatiran bahwa sistem yang berlaku saat ini akan memperburuk kecerdasan politik dan demokrasi masyarakat. Sistem proporsional terbuka harus diperbaiki secara internal dalam perekrutan wakil rakyat. Hal ini dapat menjadi jawaban atas kelemahan sistem operasional terbuka.
9	Silitonga, A. M., & Muqsith, M. A. Independence and Neutrality Journalists Ahead 2024	Media and Political Participation	Metode kualitatif	Indonesia	memahami fenomena media konglomerat yang terlibat dalam politik praktis mengancam independensi dan netralitas jurnalis yang

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
	Indonesian Presidential Election in Perspective Media Conglomerates.				bekerja di media mereka, dan mengkritik mereka.
10	Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024'Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault.	Politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan	Metode kualitatif	Indonesia	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai filosofis etika sistem demokrasi di Indonesia yang mulai mendapat perhatian khusus jelang pemilu 2024. Temuan melalui analisis genealogi politik kekuasaan merupakan sebuah demokrasi yang tidak akan pernah lepas dari politik kekuasaan dalam sistem pemerintahan manapun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemikiran kritis filosofis untuk mempertanyakan asal usul, konstruksi, dan dampak praktik kekuasaan yang ada dalam pemilu agar setiap orang yang bermain di kancah politik tetap berpijak

No	Nama dan Judul Penelitian	Teori	Metode	Lokasi	Hasil Penelitian
					pada landasan konstitusi yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa, media massa yang memiliki potensi sebagai alat kekuasaan yang efektif karena jangkauannya yang luas mampu memengaruhi masyarakat telah terpengaruh kepentingan bisnis dan politik, terjadi konglomerasi media yang dikuasai oleh oligarki media. Oligarki media yang terpusat pada elit membentuk suatu bentuk kekuasaan yang dapat digunakan sebagai alat politik oleh elit untuk mencapai tujuan mereka. Terkooptasinya oligarki media oleh elit politik dapat mengancam peran media sebagai penyampai kepentingan publik. Melalui media massa, pemilik oligarki media menjalankan hegemoni dengan menyebarkan gagasan dan ideologi yang dianggap benar oleh penguasa (Laksono, 2019). Hubungan kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik dapat memberikan dampak signifikan pada dinamika politik dalam pemilihan umum. Pertama, pengaruh kekuatan politik dan ekonomi pada bentuk dan konten media massa dapat memengaruhi persepsi publik terhadap calon dan partai politik. Keterlibatan media dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni dapat menyebabkan penonjolan pesan yang lebih terkait dengan kepentingan elit, mengorbankan netralitas dan representasi masyarakat. Kedua, peran media massa sebagai "kekuasaan keempat" memegang peranan sentral dalam proses komunikasi massa. Dalam konteks demokrasi, media diharapkan memberikan informasi yang netral dan berimbang. Namun, konglomerasi media bisa menjadi tantangan serius, mengancam independensi jurnalis dan kritik terhadap pemerintah. Proses komunikasi massa juga harus dihadapi dengan tantangan dari pembatasan kebebasan pers dan praktik sensornya.

Selanjutnya, keberadaan oligopoli media di Australia mencerminkan bagaimana faktor politik telah membantu perkembangan media dan sulit untuk melemahkan pengaruhnya. Oligopoli media ini bisa menjadi hambatan bagi demokrasi sejati, karena pembatasan pilihan bebas dapat mengancam prinsip dasar demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara media, politik, dan ekonomi dapat menciptakan dinding yang sulit ditembus, mengancam demokrasi yang seharusnya inklusif dan representatif. Adanya simulakra yang muncul dalam realitas politik melalui media massa bisa menciptakan percampuran antara realitas sejati dan tiruan. Keterlibatan media dalam politik praktis dan pengaruh ekonomi politik dapat memunculkan pemahaman yang

terdistorsi dan menciptakan citra yang tidak selalu mencerminkan kebenaran. Hal ini bisa mengakibatkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Sehingga, secara kompleksitas hubungan antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik memunculkan tantangan serius bagi demokrasi. Pemilu seharusnya menjadi wadah bagi pilihan bebas dan representasi yang adil, tetapi pengaruh media dan dinamika politik yang terpengaruh oleh kekuasaan ekonomi dan politik dapat mengancam integritas demokrasi itu sendiri. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis mereka terhadap informasi yang disajikan oleh media, serta mengawasi regulasi dan kebijakan yang dapat memastikan bahwa media tetap menjadi pilar demokrasi yang sejati.

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi panggung kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk media massa dan aspek ekonomi politik. Media massa kontemporer, yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi, memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap calon dan partai politik. Pengamatan terhadap kehidupan media massa menjadi data primer yang mengungkapkan bahwa media menjadi alat efektif dalam menyampaikan pesan politik dan membangun citra masyarakat. Namun, media massa juga berisiko kehilangan karakternya sebagai lembaga publik karena terlibat dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni. Pemilik media massa yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi dapat memengaruhi konten media, menimbulkan pertanyaan tentang netralitas media dalam konteks politik. Dalam hubungan kompleks antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik, oligopoli media di Australia memberikan gambaran bahwa kekuatan politik dan ekonomi dapat menciptakan tembok yang sulit dijebol, merugikan demokrasi sejati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi berkembang, pembatasan pada pilihan bebas dapat mengancam substansi demokrasi.

Dinamika politik dalam proses pencalonan Presiden pada pemilu 2024 memperlihatkan bahwa tindakan para aktor politik sangat memengaruhi opini publik, menegaskan peran media massa sebagai kekuasaan keempat. Namun, kehadiran konglomerasi media dapat mengancam independensi jurnalis, mengancam netralitas dalam memberikan informasi. Sistem pemilu di Indonesia, yang menggunakan sistem proporsional terbuka, menunjukkan permasalahan pada tahun 2019. Dalam menghadapi Pemilu 2024, diperlukan evaluasi dan pembenahan internal untuk memastikan sistem yang berjalan dapat menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas.

Fenomena media konglomerat yang terlibat dalam politik praktis menciptakan ancaman terhadap independensi jurnalis, menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana media massa dapat tetap netral dan independen dalam menyajikan informasi politik. Hasil

analisis dari nilai-nilai filosofis etika sistem demokrasi di Indonesia menunjukkan perlunya pemikiran kritis jelang Pemilu 2024. Pembahasan tentang asal usul, konstruksi, dan dampak praktik kekuasaan menjadi penting agar setiap partisipan dalam politik tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusi. Pada akhirnya, kompleksitas hubungan antara Pemilu 2024, media massa, dan aspek ekonomi politik membawa tantangan serius terhadap keberlangsungan demokrasi. Peran media massa sebagai pembentuk opini dan pemain kunci dalam proses politik memerlukan perhatian kritis dan regulasi yang tepat agar demokrasi tetap kuat dan berkelanjutan.

#### 1. Peta Politik Jelang Pemilu 2024

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi arena politik yang semakin rumit, terpengaruh oleh media massa dan ekonomi politik. Media massa, yang sebagian besar dikendalikan oleh sekelompok pemilik modal besar, memainkan peranan penting dalam membentuk opini publik dan menentukan arah pembangunan citra politik. Dinamika politik dalam proses pencalonan presiden juga dipengaruhi oleh aksi dan strategi para elit politik yang berusaha mendapatkan dukungan publik. Tantangan serius bagi demokrasi adalah adanya media massa yang bentuk dan kontennya lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Pertumbuhan oligopoli media di Australia menjadi contoh bagaimana kekuatan politik dan ekonomi pemilik media berperan besar dalam membentuk realitas politik.

Dalam penelitian terbarunya, Rachman (2023) mengungkapkan bahwa dinamika peta koalisi partai politik yang mendukung calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mengalami perubahan signifikan. Terutama, Partai Demokrat secara resmi mengubah dukungannya dari Anies Baswedan ke Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya. Meskipun terdapat pergeseran koalisi, potensi ketiga calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tetap ada untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang dikenal sebagai presidential threshold. Pasal 222 UU Pemilu mengatur bahwa "Pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang ikut serta dalam pemilu dan telah memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.". Selain itu, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI, mengungkapkan keprihatinannya terkait peningkatan suhu politik menjelang Pemilihan Umum pada 14 Februari 2024. Fadel menyatakan bahwa kondisi saat ini cenderung memburuk seiring dengan mendekatnya tanggal pemilihan presiden dan legislatif 2024. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga

ketenangan dan stabilitas, karena ketidakstabilan dapat memiliki dampak signifikan dan menjadi beban bagi pemerintah. Terlebih lagi, Fadel menyoroti kerentanan situasi ekonomi terhadap perubahan dan fluktuasi yang bisa terjadi kapan saja.

Dalam konteks pemilihan umum, media massa di Indonesia memiliki peran sebagai kekuasaan keempat, namun terbatas oleh konglomerasi media. Meskipun memiliki potensi untuk menyampaikan pesan politik, citra, dan pandangan masyarakat, media juga rentan terhadap kepentingan politik dan ekonomi pemiliknya. Selain itu, pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia memberikan ruang bagi dinamika politik yang kompleks. Meskipun rencana untuk beralih ke sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 telah diusulkan sebagai upaya perbaikan, tetap ada kekhawatiran terkait dengan kecerdasan politik dan demokrasi masyarakat.

Pada tingkat yang lebih luas, fenomena media konglomerat yang terlibat dalam politik praktis dapat mengancam independensi dan netralitas jurnalis, mempertanyakan integritas informasi yang disajikan kepada publik. Ini menciptakan simulakra, di mana realitas politik dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan narasi tertentu yang muncul dari media massa. Dengan demikian, Pemilu 2024 di Indonesia terjadi dalam konteks kompleks dimana media massa, dinamika politik, dan aspek ekonomi politik saling terkait. Pemetaan hubungan ini menyoroti tantangan untuk menjaga demokrasi sejati di tengah pengaruh media dan kekuatan ekonomi politik yang mungkin merusak integritas pemilihan umum dan partisipasi masyarakat.

## 2. Pengaruh Media Massa dalam Pemilu (Sebelum dan Menjelang 2024)

Pemilu merupakan momen penting dalam negara demokrasi, dan media massa memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi publik terhadap kandidat dan partai politik. Namun, media belum mampu menyajikan berita yang adil dan obyektif, karena bias politik dalam pemberitaan sering terjadi. Selain itu, penyebaran berita bohong dan disinformasi melalui media sosial menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi media di masyarakat. Regulasi media yang ketat diperlukan untuk memastikan pemberitaan yang adil dan jujur, namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebebasan pers. Menjaga keseimbangan antara regulasi dan kebebasan media menjadi isu yang kompleks saat ini. Diharapkan media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu politik yang penting menjelang pemilu dan mendorong partisipasi pemilih.

Tak hanya itu, pelaksanaan debat dan kampanye pemilu juga menguji independensi media dalam melaporkan debat kandidat dan kampanye pemilu serta media dapat mengontrol narasi dan dialog politik selama kampanye. Disamping itu, jurnalisme

investigasi berperan dalam mengungkap kebijakan dan tindakan calon-calon politik. Oleh karena itu diharapkan peran jurnalistik dapat memiliki kualitas yang tinggi. Adapun peran teknologi dalam pemilu, seperti penggunaan big data dan algoritma dalam kampanye juga akan meramaikan dalam pemilu mendatang, yang menjadi pertanyaan apakah ada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi dalam politik, dan sejauh mana implementasinya.

Sebelum Pemilu 2024, pengaruh media massa sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan ekonomi. Konten media, baik bentuk maupun substansinya, terbentuk oleh faktor-faktor ini. Oligopoli media, terutama di Australia, menunjukkan bagaimana kebijakan politik dan izin stasiun televisi memberikan kekuasaan yang sulit diganggu kepada pemilik media. Hal ini dapat mengancam esensi demokrasi, mengingat media telah terlibat dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni, yang berpotensi mengarah pada keterbatasan pilihan dan kehilangan karakter lembaga publik. Sebagai kekuatan keempat, media massa memainkan peran vital dalam proses politik. Dalam demokrasi, peran media ini dapat mencerminkan teori libertarian dan tanggung jawab sosial, mendukung perkembangan demokrasi. Namun, konglomerasi media menjadi tantangan serius. Di negara dengan sistem media sesuai dengan teori otoriter atau komunis, peran media sebagai kekuatan keempat mungkin tidak dapat direalisasikan. Pemilihan bentuk sistem politik dan media berpengaruh pada keberhasilan media sebagai kekuatan keempat dalam mendukung demokrasi.

Dinamika politik terkait pencalonan Presiden sebelum Pemilu 2024 sangat dipengaruhi oleh media massa. Figur aktor politik dan partai politik menggunakan media untuk memengaruhi opini publik dan meraih dukungan. Peran media dalam menciptakan citra, pesan politik, dan pandangan masyarakat menjadi kunci dalam proses pencalonan. Pengaruh media terlihat sebagai faktor krusial dalam membentuk persepsi dan preferensi pemilih. Selain itu, Kepemilikan media memiliki peran penting dalam menentukan arah pemberitaan. Keterkaitan media dengan kepentingan politik dan ekonomi pemiliknya dapat memengaruhi independensi dan netralitas jurnalis. Fenomena konglomerat media yang terlibat dalam politik praktis dapat mengancam integritas jurnalis dan mempengaruhi arus informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Media massa memiliki dampak besar pada nilai-nilai filosofis etika demokrasi. Sebelum Pemilu 2024, media membentuk dan mencerminkan nilai-nilai politik dalam masyarakat. Terkadang, media terlibat dalam praktik-praktik yang mengancam integritas demokrasi, seperti penekanan pada kepentingan eksklusif dan monopoli informasi yang dapat membatasi kebebasan pemilihan dan partisipasi warga negara. Sehingga, dengan

kemajuan teknologi dan terus berkembangnya media sosial, prediksi pengaruh media pada Pemilu 2024 mencakup peningkatan peran media digital dalam menyebarkan informasi dan memengaruhi opini publik. Pengawasan ketat dan regulasi terhadap media diharapkan menjadi fokus untuk menjaga integritas demokrasi. Kritik terhadap media massa yang terlibat dalam politik praktis dapat menjadi lebih vokal, dengan tuntutan untuk independensi dan netralitas yang lebih besar. Keterlibatan media dalam proses pemilihan dan pencalonan Presiden akan menjadi sorotan, dengan pemilih lebih kritis terhadap informasi yang diterima dari berbagai platform media. Secara keseluruhan, media massa diantisipasi tetap menjadi pemain kunci dalam membentuk opini dan arah politik selama Pemilu 2024, namun dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan peran kritis ini.

Peneliti berharap nantinya media dapat mendorong partisipasi pemilih dalam pemilu. Sehingga, rendahnya partisipasi pemilih sebenarnya dapat diatasi melalui upaya media yang lebih efektif. Diskusi mengenai hubungan antara media dan politik menjelang pemilu 2024 dapat membantu pemahaman tentang peran media dalam proses politik dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan bijak dan kritis dalam masyarakat yang semakin terhubung.

## SIMPULAN

Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, pemberitaan oleh media massa memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk opini publik dan citra politik. Meskipun media massa memiliki potensi sebagai alat kekuasaan, keberlanjutan demokrasi terancam oleh keterlibatan dalam politik oligarki, monopoli, dan hegemoni. Pemilu menjadi panggung kompleks yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi politik, dengan oligopoli media yang dapat membatasi pilihan bebas dan mengancam integritas lembaga publik. Dinamika politik terkait pencalonan Presiden dan proses Pemilu sangat dipengaruhi oleh media, yang digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra yang menguntungkan. Dalam menghadapi tantangan ini, prediksi untuk Pemilu 2024 mencakup peningkatan peran media digital, yang menuntut pengawasan ketat dan regulasi untuk menjaga integritas demokrasi. Kesadaran kritis masyarakat terhadap informasi media menjadi kunci untuk melawan potensi polarisasi dan perpecahan, memastikan bahwa masyarakat dapat bersikap bijak dan kritis dalam menyikapi informasi yang disajikan menjelang pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Geneologi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474-486. DOI: <https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.62767>
- Ane. D. (2023). <https://lsfdiscourse.org/jean-baudrillard-simulakra-dan-hiperrealitas-masyarakat-postmodern/>
- Barokah, F., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 1-13. URI: <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47697>  
<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Fachrudin, A. (2022). Oligarki Demokrasi dan Konglomerasi Media Massa.
- H. Chon, Theodore (2002); *Global Political Economy, Theory and Practice*, Second Edition; Simon Fraser University; Addison Wesley Longman Inc; New York.
- Haris, S. (2020). Menuju Reformasi Partai Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartati, A. Y., & Wahyuni, Y. (2021). Oligopoli di Negara Demokrasi: Praktek dan Kepentingan Ekonomi Politik Media Massa di Australia. *Spektrum*, 18(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/spektrum.v18i1.4101>
- Hasan, K. (2014). Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014. *Jurnal Suwa Fisip Universitas Malikussaleh*, 12(1), 41-61.
- Hasan, K. (2017). Kajian Ekonomi Politik MediA. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, 199-213  
<https://www.mpr.go.id/berita/Suhu-Panas-Jelang-Pemilu,-Fadel-Muhammad>  
<https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/579-unand-pemilu-kredibilitas-media.html>
- Intani, A. (2023). Analysis of the Closed Proportional Implementation Plan in the 2024 Election. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(3), 161-172. DOI: <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i3.3454>
- Kumala, F., Rahmayuni, R., Ariska, F., & Dinata, S. (2021). Oligarki dalam demoksari indonesia membuat hukum sulit di tegakkan. *Jurnal Fusion*, 1(2), 40-48. DOI: <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.15>
- Laksono, P. (2019). Kuasa Media Dalam Komunikasi Massa. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 4(2), 49-61.
- Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik. *Media Kita*, 4(1), 62-73. DOI: <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448>

- Mc Quail, Denis (2002); *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, (3rd Edition; London-Thousand Oaks-New Delhi).
- Mosco, Vincent (1996); *The Political Economy of Communication, Rethinking and Renewal*; SAGE Publications Ltd 6 Bonhill street; London EC2A 4 PU.
- Rachman, A. (2023), CNBC Indonesiacnbcindonesia.com/news/20230924104044-4-475033/peta-politik-berubah-ini-koalisi-baru-anies-prabowo-ganjar
- Ramadlan, M. F. S., & Masykuri, R. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 141-158.
- Reader (1995); *Approaches to Media*, Edited by Oliver Boyd-Barrett and Chris Newbold; *Foundations in Media*; Arnold; London.
- Retamara, R., Budianto, K., & Apriani, R. (2023). Analisis Tindakan Aktor-Aktor Politik Jelang Pemilu Tahun 2024 dalam Proses Pencalonan Melalui Media Sosial. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 2(3), 157-169. DOI <https://doi.org/10.19109/jsipol.v2i3.18043>
- Silitonga, A. M., & Muqsith, M. A. Independence and Neutrality Journalists Ahead 2024 Indonesian Presidential Election in Perspective Media Conglomerates. doi: 10.47191/ijsshr/v6-i7-37, Impact factor- 6.686
- Simarmata, S. (2017). Paralelisme politik media dalam pemberitaan pemilu 2014 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 149-168. DOI: <https://doi.org/10.24002/jik.v14i2.885>
- Triputranti, C. S. (2023). Oligarki Dan Konvergensi Media Dalam Pemberitaan "Jokowi 3 Periode". *Lensa*, 17(1), 23-39.
- Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 163-168. DOI: <https://doi.org/10.59000/jim.v2i1.107>